

Pemerintahan Hamas dan Prospek Perdamaian

BROTO WARDOYO

Abstract

The assumption of Hamas as a terrorist organization has led the peace process to adopt the strategy to exclude Hamas. Hamas' victory in the 2006 parliament election soon followed by resistances and rejections from Israel, the US and several European countries. This eventually leads to the isolation of Palestine by donor countries and affects Palestinian economy. In order to start the peace process, the world first needs to acknowledge the Hamas government and not to assume them as a terrorist organization. The peace process should realize that Hamas' acts during the 1993-2005 periods were their attempts to enter Palestinian political structure. Hamas show a more pragmatic political move lately with their readiness to enter the negotiation as long as Israel will retreat from the Occupied Territories. This shows their commitment to peace process rather than to ideological values of jihad to free the whole land of Palestine and erect an Islamic State. Hamas' commitment to hudna should be seen as their attempt to create a peace mechanism. This attempt should be followed by a negotiation between Israel and the Palestinian Authority (PA) under guidance of a fair mediator.

Key Words: Hamas, peace process, Palestinian conflict

Kemenangan Hamas (*Harakat al-Muqawwama al-Islamiyya*) dalam pemilu parlemen Palestina pada Januari 2006 membawa nuansa baru pada proses perdamaian. Hamas yang identik dengan kekerasan dan *spirit* anti-perdamaian di luar dugaan muncul sebagai pilihan rasional publik Palestina untuk memerintah. Hamas lebih dikenal sebagai sayap militer garis keras

Palestina yang sering melakukan serangan roket dan bom bunuh diri (lihat tabel 1). Tindakan-tindakan tersebut membuat Hamas dicap sebagai penghambat (*spoiler*) proses perdamaian. Akibatnya, Hamas tidak pernah dilibatkan dalam proses Palestina dan bahkan diidentifikasi sebagai kelompok teroris dan berusaha untuk dihancurkan.

Tabel 1
Aksi-Aksi Kekerasan yang Dilakukan oleh Hamas Selama Periode 1993-2002

1.	14 September 1993	Serangan granat tangan ke kantor polisi Israel di Gaza	Tidak ada catatan	Dilakukan oleh Bahaa al-Din al-Najr dan dilakukan sebagai respon atas penandatanganan Kesepakatan Oslo.
----	-------------------	--	-------------------	---

2.	4 Oktober - 1993	Penabrakan bom mobil ke sebuah bus di terminal Beit el, Ramallah	30 orang luka-luka	Respon terhadap serangan Israel ke penduduk Palestina di Gaza sebagai bagian dari kampanye anti-Islam yang dimunculkan oleh PM Rabin.
3.	26 November 1993	Demonstrasi dan kerusuhan di Gaza	Tidak ada catatan	Respon terhadap pembunuhan aktivis Hamas, Imad Aqel.
4.	26 April 1994	Penabrakan bom mobil ke pos registrasi di terminal bus Afula	9 orang tewas dan 150 orang luka-luka	Respon terhadap penyerbuan Masjid al-Ibrahim di Hebron.
5.	25 Februari - 3 Maret 1996	Serangkaian bom bunuh diri di Wilayah Pendudukan	58 orang tewas	Dilakukan menjelang perundingan Kesepakatan Hebron.
6.	29 Oktober 1998	Bom mobil di dekat Khan Younis	Tidak ada catatan	Dilakukan sebagai protes terhadap perundingan Wye River.
7.	9 September 2001	Bom bunuh diri di stasiun KA Wahariya	4 tewas dan 63 luka-luka	Dilakukan menjelang pertemuan Arafat-Peres.
8.	November 2001	Serangkaian serangan roket di Gaza	Tidak ada catatan	Dilakukan sebagai respon terhadap kebijakan <i>targeted assassination</i> yang dilaksanakan Israel pasca <i>intifadah</i> kedua.
9.	10 April 2002	Bom bunuh diri dalam bus di Haifa	8 orang tewas dan 14 orang luka-luka	Balasan terhadap serangan pasukan Israel ke pemukiman di Gaza
10.	18 Juni 2002	Bom bunuh diri dalam bus di Yerusalem Selatan	20 orang tewas	Balasan terhadap serangan Israel ke pemukiman di Gaza

Disarikan dari berbagai sumber: lihat dalam Akbar Mia, 2002 *Pengaruh Strategi Hamas pada Proses Perdamaian Palestina-Israel September 1993-Juni 2002*, UI, halaman 68-72, skripsi tidak dipublikasikan.

Sikap negatif Hamas terhadap proses perdamaian tersebut seringkali dikaitkan dengan faktor ideologi Islam Hamas. Hamas memang menggunakan Islam sebagai dasar gerakannya.¹ Hamas juga menye-rukan jihad sebagai satu-satunya solusi untuk membebaskan Palestina dari penguasaan Israel dan mendirikan negara Islam Palestina.² Tuntutan jihad yang menyerukan penghancuran negara Israel dan pen-dirian negara Islam Palestina di seluruh wilayah (mandatoris) Palestina ini dinilai sebagai sikap anti-perdamaian. Hal ini disebabkan karena proses perdamaian mengadopsi prinsip solusi dua negara (*two states solution*) seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Prinsip.³

Munculnya Hamas ke tampuk kekuasaan Palestina dikhawatirkan akan membawa pengaruh buruk terhadap proses perdamaian. Kemenangan Hamas tersebut dengan segera diikuti oleh penolakan demi penolakan oleh para aktor utama proses perdamaian, seperti Israel, AS atau bahkan Uni Eropa.⁴ Bukan itu saja, penolakan juga muncul dari dalam Palestina sendiri. Mahmoud Abbas, Presiden Palestina yang berasal dari partai Fatah, menyarankan agar proses perdamaian dilanjutkan melalui PLO, dimana Hamas tidak termasuk di dalamnya.⁵

Tulisan ini akan melihat posisi Hamas dalam proses perdamaian sejak 1993 hingga

2005. Bagian pertama tulisan akan menelaah strategi perdamaian tanpa Hamas yang selama ini diadopsi.⁶ Apakah tindakan-tindakan Hamas merupakan aksi-aksi anti-perdamaian atau bukan. Secara spesifik, tulisan ini akan lebih diarahkan untuk melihat justifikasi agama yang dibawa Hamas dan seberapa besar perannya untuk memahami aksi-aksi Hamas. Pertanyaan mengenai apakah transformasi Hamas memungkinkan untuk dilakukan juga akan menjadi perhatian penting dalam bagian ini. Munculnya realitas kemenangan Hamas dalam pemilu parlemen akan menjadi pembahasan bagian kedua dari tulisan ini. Faktor apakah yang berperan penting dalam kemenangan tersebut merupakan pertanyaan utama yang ingin dijawab. Bagian ketiga akan melihat prospek perdamaian ke depan dan strategi perdamaian seperti apa yang bisa dimunculkan.

PERDAMAIAN TANPA HAMAS: 1993-2005

Hamas muncul hampir bersamaan dengan pecahnya *intifadah* tahun 1988.⁷ Keberadaan Hamas tidak bisa dilepaskan dari organisasi induk mereka, *Moslem Brotherhood Society* (Persaudaraan Muslim), yang berpusat di Mesir. Persaudaraan Muslim adalah sebuah organisasi massa yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang Islami, yang mendekati masyarakat pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad. Usaha *Islamic revivalism* (kebangkitan kembali Islam) tersebut salah satunya ditandai dengan pembentukan negara Islam dengan Qur'an dan *sunah* sebagai landasan kehidupan masyarakat. Persaudaraan Muslim sendiri lebih memilih untuk menjauhi politik.

Dalam kasus Palestina, sikap apolitis yang dipilih Persaudaraan Muslim tersebut menimbulkan kritik internal yang berujung pada perpecahan antara kelompok tradisional dan kelompok radikal yang akhirnya memunculkan *Jihad Islam* pada awal 1980-an. Tahun 1973, tokoh-tokoh Persaudaraan Muslim Palestina mendirikan *al-Mujamma al-Islami (Islamic Center)* yang berfungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan Persaudaraan Muslim Palestina. *Al-Mujamma* inilah yang pada akhirnya berubah menjadi Hamas.⁸

Ada empat alasan yang mendasari munculnya Hamas, yaitu: pendudukan Israel, kekecewaan terhadap PLO, berkembangnya politik Islam dan pecahnya *intifadah*.⁹

Pendudukan Israel sejak 1967 memberikan beragam persoalan bagi penduduk Palestina di Wilayah Pendudukan. Restriksi-restriksi yang diberlakukan oleh pemerintah Israel membuat penduduk Palestina hidup dalam kemiskinan akut. Hal ini memunculkan semangat anti penindasan yang terus terpupuk dalam benak publik dan tokoh-tokoh Palestina di Wilayah Pendudukan. Kondisi ini tidak diimbangi dengan keberhasilan kinerja PLO, yang saat itu merupakan satu-satunya harapan publik Palestina. Pilihan sekuler PLO juga memunculkan persoalan bagi para tokoh Persaudaraan Muslim di Wilayah Pendudukan. Ada ketakutan bahwa PLO akan menciptakan Palestina yang sekuler dan bukan Palestina yang Islami. Padahal pada saat yang bersamaan di Dunia Arab tengah berkembang politik Islam. Politik Islam yang sebenarnya sudah mulai muncul sejak abad ke-19 menemukan kebangkitannya dengan keberhasilan Revolusi Islam Iran

tahun 1979 dan munculnya kelompok Mujahidin di Afghanistan.

Kulminasi dari ketiga faktor tersebut pecah dalam kerusuhan massa (yang lebih dikenal sebagai *intifadah*) tahun 1988. *Intifadah* sendiri pecah secara spontan tanpa keputusan politik dari faksi Palestina apapun. Hamas diidentikkan dengan *intifadah* karena keterlibatan mereka secara aktif untuk menggerakkan demonstrasi dan unjuk rasa terhadap Israel melalui pamflet-pamflet yang mereka sebarakan sejak 14 Desember 1987.

Lahirnya Hamas secara signifikan mengubah pola hubungan Israel-Palestina dengan munculnya Islamisasi konflik Israel-Palestina. Hamas menempatkan Palestina sebagai wilayah *dar al-harb*, wilayah Muslim yang dikuasai oleh kaum kafir, dan menyerukan jihad untuk membebaskan Palestina yang tertindas. Itu artinya, panggilan bagi penghancuran negara Israel adalah hal yang tidak dapat ditolak. Dampak dari pandangan ini adalah munculnya kondisi *zero sum*. Pemahaman ini yang kemudian mengarahkan posisi Hamas *vis a vis* proses perdamaian. Seruan penghancuran terhadap negara Israel dianggap tidak sejalan dengan semangat perdamaian yang mensyaratkan adanya dua negara, Israel dan Palestina, yang hidup berdampingan. Pandangan Hamas yang anti-perdamaian tersebut semakin mendapatkan justifikasi manakala Hamas menilai usaha PLO untuk berunding dengan Israel sebagai usaha untuk menjual wilayah suci Islam. Dalam pandangan Hamas, Palestina adalah tanah *waqf* bagi seluruh Muslim dan kepemilikan atas Palestina bukan hanya oleh bangsa Palestina. Usaha untuk menegosiasikan pembagian wilayah Palestina dinilai oleh

Hamas sebagai pengkhianatan terhadap umat Muslim sedunia. Karenanya, Hamas menilai keterlibatan PLO dalam proses perundingan sebagai pengkhianatan terhadap Islam.

Dalam pemahaman tersebut proses perdamaian kemudian mengadopsi kebijakan untuk tidak melibatkan Hamas. Dampak dari strategi perdamaian yang tanpa Hamas tersebut adalah munculnya Hamas sebagai kekuatan di luar proses perdamaian yang secara otomatis berusaha mengganggu proses perdamaian. Asumsi Hamas yang anti-perdamaian tersebut juga menjadi justifikasi bagi Israel untuk menghancurkan keberadaan Hamas. Usaha tersebut dilakukan salah satunya dengan mengimplementasikan *policy of targeted assassination* yang memakan korban dua pemimpin utama Hamas, Shaykh Ahmad Yasin dan Abdel Aziz Rantisi.

Pandangan tersebut melupakan dua hal penting berkenaan dengan Hamas, yaitu: Hamas merupakan sebuah gerakan perlawanan (*resistance movement*) dan Hamas merupakan sebuah gerakan politik. Harus disadari bahwa Hamas lahir sebagai bentuk kemarahan publik Palestina atas okupasi Israel. Tindakan-tindakan Hamas pun tidak bisa dilepaskan dalam konteks perlawanan terhadap okupasi Israel. Usaha untuk memasukkan Hamas ke dalam gerakan teroris menjadi kurang masuk akal, mengingat Hamas memiliki tuntutan yang spesifik dan tegas, yaitu: kemerdekaan Palestina dan pembentukan negara Islam Palestina. Dalam piagam Hamas memang disebutkan bahwa negara Islam Palestina yang merdeka tersebut akan meliputi seluruh bekas wilayah mandatoris Palestina namun dalam perkembangan selanjutnya

jutnya terlihat adanya pragmatisme politik yang mengindikasikan penerimaan Hamas terhadap negara Palestina di Wilayah Pendudukan saja.¹⁰

Pada awal pendiriannya, Hamas lebih mengedepankan isu pembentukan negara Islam Palestina. Hal ini tentunya tidak lepas dari kuatnya posisi PLO dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. PLO yang sudah diakui secara internasional tentu bukanlah tandingan Hamas yang baru lahir. Hamas tampaknya sadar betul bahwa menentang apalagi menantang PLO tidak akan berbuah banyak. Yang kemudian muncul adalah usaha Islamisasi konflik Palestina-Israel agar Hamas mendapatkan justifikasi atas keberadaannya.¹¹ Dengan strategi ini, Hamas kemudian mampu menandingi posisi PLO. Alasan lain yang mendorong dipilihnya strategi ini adalah kedekatan Hamas dengan Persaudaraan Muslim. Keberadaan tokoh-tokoh Persaudaraan Muslim dalam Hamas tentunya memberikan pengaruh pada kehadiran warna Islam dalam strategi perjuangan Hamas. Pada perjalanannya, dalam tubuh Hamas sendiri muncul tokoh-tokoh muda yang lebih pragmatis dan tidak memiliki ikatan yang kuat dengan Persaudaraan Muslim yang pada gilirannya membawa dampak pada tuntutan pragmatisme politik Hamas.

Perlu pula diperhatikan bahwa Hamas pun mengembangkan pragmatisme politik terutama pasca-Yassin dan Rantisi. Sejak awal berdirinya, Hamas memiliki dua sayap organisasi (yang mungkin tumpang-tindih): politik dan militer. Sayap militer Hamas cenderung lebih berperan dibandingkan sayap politiknya pada masa awal kemunculan Hamas. Hal ini terkait dengan keti-

dakmampuan sayap politik Hamas untuk menyaingi posisi PLO yang sudah lebih mapan. Sayap militer Hamas berperan untuk mengimbangi peranan PLO terutama dalam memberikan jaminan keamanan terhadap publik Palestina. Pasca-Yassin dan Rantisi terlihat adanya peran sayap politik Hamas yang berpuncak pada kesediaan Hamas menjadi peserta pemilu lokal akhir tahun 2005 dan pemilu legislatif Palestina awal tahun 2006. Pragmatisme politik Hamas juga muncul bersamaan dengan adanya pergeseran kekakuan ideologis Hamas. Keikutsertaan Hamas dalam *hudna* (gencatan senjata sepihak) tahun 2003 menjadi sinyal pragmatisme politik Hamas. Tindakan ini mematahkan asumsi bahwa Hamas akan selalu menentang proses perdamaian dan menentang negara Israel. *Hudna* menandai kesediaan Hamas untuk berdialog.

Dengan demikian, strategi perdamaian tanpa Hamas sebenarnya tidak lagi memungkinkan untuk dilanjutkan. Pergeseran ideologis dan pragmatisme politik Hamas menjadi dua alasan mendasar untuk mengubah mekanisme perdamaian yang selama ini dipilih.

PEMILU LEGISLATIF PALESTINA 2006: PRO-HAMAS ATAU ANTI-FATAH?

Alasan ketiga kenapa strategi perdamaian tanpa Hamas tidak lagi bisa diimplementasikan adalah terjadinya perubahan realitas politik Palestina. Kemenangan Hamas dalam pemilu parlemen mengubah peta politik Palestina membuat Hamas bukan lagi menjadi kekuatan kedua namun sudah berubah menjadi kekuatan pertama. Pun, Hamas sudah tidak lagi ada di luar

struktur politik tapi bahkan mengendalikan struktur politik.

Ada tiga faktor penting yang mendorong kemenangan Hamas dalam pemilu Parlemen, yaitu: kekecewaan terhadap proses Oslo, kekecewaan terhadap Fatah dan perpecahan internal Fatah.

Ketika Oslo ditandatangani, publik Palestina mengharapkan adanya perbaikan kondisi hidup dan jaminan keamanan, termasuk di dalamnya pengurangan restriksi-restriksi Israel. Besarnya harapan terhadap proses perdamaian a la Oslo tersebut ternyata tidak bisa dipenuhi. Pasca-Oslo kehidupan publik Palestina bukannya semakin membaik namun justru memburuk. Dalam empat tahun terakhir, tepatnya sejak pecahnya *intifadah* kedua, kondisi hidup publik Palestina menurun tajam. Angka kemiskinan yang mencapai angka 47% (tahun 2004) dan tingkat pengangguran yang mencapai angka 25,7% (tahun 2003) merupakan dua indikator yang bisa menunjukkan penurunan taraf hidup publik Palestina. GDP Palestina pasca-*intifadah* kedua pun menurun tajam 35% dibanding sebelum *intifadah* kedua.¹² Stagnasi atau bahkan penurunan taraf hidup tersebut masih ditambah dengan beragam restriksi yang diakibatkan kebijakan-kebijakan penutupan Israel. Publik Palestina pada akhirnya kehilangan kepercayaannya terhadap proses Oslo.

Selain taraf kehidupan, harapan akan keamanan yang lebih besar pasca-Oslo ternyata tidak dapat dipenuhi. Pasca-Oslo publik Palestina mengharapkan adanya perlindungan militer Palestina dari serangan Israel ataupun tekanan-tekanan yang diterima dari Israel. Militer Palestina, yang

didominasi oleh Fatah, yang semula diharapkan akan memberikan jaminan keamanan bagi publik ternyata berubah fungsi menjadi alat keamanan bagi elit semata. Ketidakmampuan Fatah memberikan jaminan keamanan ini diimbangi oleh kemampuan Hamas menunjukkan perlindungan melalui aksi-aksi militer mereka terhadap Israel. Aksi-aksi militer Hamas terhadap Israel dipahami oleh publik sebagai usaha perlindungan Hamas bagi publik Palestina. Ketika Israel memutuskan untuk menarik diri dari Gaza publik pun menerima sepenuhnya klaim Hamas bahwa penarikan tersebut adalah hasil dari usaha Hamas.¹³

Hamas yang menentang proses perdamaian, yang dimulai dari Oslo, pada akhirnya menjadi pilihan rasional publik Palestina. Hamas diharapkan akan mampu mendo-brak kelemahan-kelemahan Oslo untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi publik Palestina. Posisi Hamas yang imun dari proses perdamaian versi Oslo menjadi daya tarik utama publik. Wajar jika publik lebih memilih Hamas dibandingkan Fatah yang merupakan arsitek Oslo.

Kekecewaan terhadap proses perundingan tersebut dibarengi dengan semakin meningkatnya kekecewaan terhadap Fatah. Fatah yang merupakan faksi terbesar dalam PLO, yang kemudian mentransformasi dirinya menjadi Otoritas Palestina, digero-goti oleh isu korupsi. Parahnya, korupsi ini dilakukan ketika kondisi ekonomi publik Palestina sedang terpuruk. Isu korupsi ini menimbulkan kemarahan publik pada Fatah yang berimbas pada penurunan perolehan suara Fatah dalam pemilu legislatif. Sementara itu, Hamas berhasil memanfaatkan dengan baik kegi-

atan-kegiatan sosial dan pendidikan yang dilaksanakan melalui Persaudaraan Muslim untuk mendapatkan simpati dan dukungan publik.

Kemenangan Hamas juga ditentukan oleh adanya faktor perseteruan tua-muda dalam tubuh Fatah. Pertarungan antara kubu tua melawan kubu muda dalam Fatah mencapai puncaknya pasca meninggalnya Yasser Arafat. Karisma Mahmoud Abbas sebagai pengganti Arafat terlihat tidak mampu meminimalkan konflik internal tersebut.¹⁴ Dalam Pemilu Presiden tahun 2005 Abbas mampu mengakomodasi ketidakpuasan kelompok muda dengan memunculkan rencana regenerasi di Fatah. Selama rencana regenerasi tersebut belum dijalankan perseteruan tua-muda tersebut akan terus ada. Menjelang pemilu legislatif kemarin, perseteruan ini kembali mencuat ke permukaan sebelum akhirnya Abbas mampu meredakannya dengan mengubah daftar calon legislatif Fatah dengan memberikan kesempatan lebih banyak kepada tokoh-tokoh muda. Perpecahan internal Fatah ini memberikan berkah bagi Hamas.

KEMENANGAN HAMAS = KEMENANGAN PALESTINA?

Kemenangan Hamas diklaim sebagai kemenangan Palestina. Namun, kemenangan Hamas membawa dua masalah serius bagi Palestina, yaitu: perpecahan internal Palestina dan isolasi asing.

Perpecahan internal Palestina sangat dimungkinkan jika Hamas dan Fatah tidak mampu membangun semangat dialog. Perseteruan kedua faksi sebenarnya bermuara pada satu hal: kedua kelompok sama-sama mengklaim diri mereka sebagai Palestina

yang sejati. Keduanya membangun klaim keotentikan mereka sebagai bangsa Palestina secara berbeda. Hamas mengedepankan nuansa Palestina yang Islami, sedangkan Fatah membangun klaim yang lebih sekuler. Meski demikian, ada satu kelemahan dari kedua klaim tersebut. Keduanya dibangun sebagai reaksi terhadap zionisme/pendudukan Israel. Artinya, nasionalisme Palestina, baik versi Hamas ataupun versi Fatah, muncul sebagai reaksi dari zionisme. Dampaknya, jika kita bicara masalah nasionalisme Palestina maka kita akan senantiasa membicarakan Israel. Logikanya, jika zionisme dihapuskan maka nasionalisme Palestina akan menghilang.

Usaha untuk merunut nasionalisme Palestina hingga saat ini sulit sekali dilakukan. Satu persamaan klaim nasionalisme Hamas dan Fatah ada pada sentralitas Yerusalem dalam membangun kebangsaan Palestina. Jika demikian halnya, cenderung lebih rasional untuk berbicara tentang bangsa Yerusalem dibandingkan bangsa Palestina. Hal yang lebih buruk lagi, beberapa negara Arab sendiri mengklaim memiliki hak atas wilayah Palestina. Misalnya usaha Suriah untuk memasukkan Palestina sebagai salah satu wilayahnya dengan berdasar pada sejarah wilayah Sham. Atau Yordania yang masih tetap mengklaim Tepi Barat sebagai bagian wilayahnya.

Ada baiknya bagi Hamas dan Fatah untuk duduk bersama dan merumuskan konsep kebangsaan Palestina. Dibutuhkan konsep kebangsaan yang bebas-Israel agar nasionalisme Palestina tersebut kuat. Bangunan nasionalisme yang benar-benar Palestina tersebut akan bisa menjadi pegangan dan titik pusat dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Dengan demikian aroma permu-

suhan kedua faksi akan bisa terkontrol dan tidak merugikan publik.

Masalah kedua yang harus diperhatikan adalah masalah kepemilikan senjata. Perseveruan Hamas-Fatah cenderung sulit dikendalikan mengingat kedua kelompok tersebut sama-sama memiliki senjata. Kemungkinan penyalahgunaan senjata oleh faksi yang kalah dalam pemilu untuk merongrong pemerintahan sangatlah terbuka. Apalagi komitmen pengikut kedua kelompok diberikan sebatas pada kelompoknya, bukan pada seluruh Palestina.

Untuk mencegah penggunaan senjata dalam konflik internal, ada baiknya dilakukan usaha pembentukan tentara yang ultra-faksi. Ada dua masalah yang akan muncul dari ide ini: pertama, perubahan komitmen dan kedua, tentangan dari luar (terutama Israel). Perubahan komitmen atau kesetiaan perlu dilakukan. Redefinisi kesetiaan tersebut hanya dapat dimaksimalkan jika bangunan nasionalisme Palestina telah disepakati terlebih dahulu. Konsep kebangsaan yang kuat akan bisa dijadikan rujukan bagi tentara ultra-faksi yang akan dibentuk. Tentangan dari luar terhadap proses penyatuan sayap militer Hamas-Fatah akan muncul sebagai dampak tindakan-tindakan sayap militer Hamas di masa yang lalu. Stigma Hamas sebagai sumber teror tidak akan dengan mudah diubah oleh Israel. Usaha politik untuk menerima kehadiran sayap militer Hamas sebagai bagian dari tentara Palestina harus dilakukan secara bersama.

Jika Hamas dan Fatah gagal membangun dialog, hal itu akan merugikan publik Palestina dan akan cenderung dimanfaatkan oleh Israel. Misalnya, ketika *disengage-*

ment plan dimunculkan oleh PM Ariel Sharon, banyak pihak menilainya sebagai rencana damai alternatif pasca *Road Map*. Namun jika dilihat kampanye Sharon kepada kelompok sayap kanan di Likud, ada pemahaman yang berbeda dari *disengagement plan*. Pemahaman yang berbeda tersebut dikemukakan oleh Weisglass, penasehat PM Sharon, yang menyatakan bahwa *disengagement plan* merupakan cara terbaru untuk menguasai wilayah Palestina dan menempatkan Palestina dalam tekanan internasional. Logikanya sederhana, Israel akan menarik diri dari Gaza dan meninggalkannya dibawah kontrol Otoritas Palestina (yang dikuasai Fatah). Kekacauan diharapkan akan muncul di wilayah Gaza mengingat Gaza secara tradisional adalah basis Hamas. Israel sendiri akan terlepas dari tanggungjawab akan kekacauan tersebut. Dan jika kekacauan terus berlanjut, Israel akan mendapatkan justifikasi untuk melakukan intervensi untuk menjamin keamanannya. Jika hal ini terus dibiarkan, Gaza dan Tepi Barat bisa berubah menjadi dua entitas yang berbeda. Kemampuan Israel untuk memecah belah Palestina nampaknya tidak pernah menjadi bahan pertimbangan kedua faksi untuk melakukan introspeksi.

Selain masalah "antara Gaza dan Tepi Barat", masalah lain yang dihadapi oleh Palestina adalah isolasi asing sebagai dampak dari naiknya Hamas ke tampuk kekuasaan. Kemenangan Hamas dengan segera diikuti oleh penolakan dari Israel, AS dan bahkan Uni Eropa. Permasalahannya, mereka adalah negara donor utama Palestina. Suka tidak suka, Hamas harus mampu membangun kepercayaan asing, terutama dari negara-negara donor utama Palestina. Patut dicatat, kebutuhan finan-

sial Palestina sampai saat ini masih sangat tergantung dari bantuan negara-negara donor, terutama Uni Eropa dan AS. Dukungan dan komitmen kedua negara tersebut terhadap kehidupan Palestina sangat bergantung pada kemampuan Hamas untuk mendekati mereka. Jika Hamas masih memilih pendekatan militeristik dalam hubungan Israel-Palestina bisa dipastikan bahwa bantuan kedua negara tersebut akan tersendat atau bahkan terhenti. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kehidupan rakyat Palestina dan juga masa depan Hamas di pemerintahan.

Saat ini, kebutuhan utama publik Palestina adalah penyediaan lapangan kerja dan rekonstruksi ekonomi. Dan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut dukungan dana asing sangatlah vital. Perlu dicatat, laporan Bank Dunia tahun 2004 mencatat bahwa Palestina membutuhkan dana US\$ 500 juta hingga US\$ 900 juta per tahun untuk membangun ekonominya. Pendapatan domestik Palestina sendiri hanya mencapai angka US\$ 68 juta pada tahun 2004 dengan defisit anggaran mencapai US\$ 51 juta.¹⁵ Gambaran buruk perekonomian Palestina tersebut masih ditambah oleh restriksi-restriksi ekonomi dari Israel.

Untuk mengantisipasi kemungkinan mandegnya proses perdamaian, dibutuhkan perubahan mekanisme dalam proses perdamaian. Salah satu ide yang bisa diangkat untuk memecah kebuntuan proses perdamaian pasca-kemenangan Hamas adalah dengan memunculkan kembali ide tentang *hudna*. Istilah *hudna* ini sendiri mengacu pada gencatan senjata untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Konsep ini sudah dimunculkan Hamas sejak masa Yassin memimpin Hamas. *Hudna* menjadi celah

yang bisa menunjukkan karakter damai Hamas. Konsep ini, sama seperti jihad, mengakar pada pemikiran Islam, jadi dengan memunculkan *hudna* Hamas tidak dengan serta merta merubah arah dan landasan ideologisnya namun hanya melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap ideologisnya. *Hudna* berakar pada tradisi Islam ketika Nabi Muhammad SAW memutuskan melakukan gencatan senjata dalam perang ketika masuk bulan Ramadhan. Meski ada kekhawatiran bahwa pelaksanaan *hudna* hanyalah merupakan alat bagi konsolidasi kekuatan, fakta bahwa Hamas bersedia melakukan gencatan senjata merupakan fenomena menarik.¹⁶

Hudna menjadi bukti bagi penyesuaian ideologis yang dilakukan Hamas. Dengan melaksanakan *hudna*, Hamas tidak lagi menjadi organisasi yang kaku dengan ideologinya. Pemahaman bahwa Hamas identik dengan jihad dan jihad identik dengan perang berubah dengan pelaksanaan *hudna*. Pintu bagi perdamaian masih terbuka dengan implementasi *hudna*. Hamas sendiri pernah mendeklarasikan *hudna* pada Juni 2003 yang sayangnya dipahami negatif oleh Israel. Israel tidak memandang tindakan Hamas ini sebagai sesuatu yang signifikan bagi perdamaian dan tetap melaksanakan kebijakan militer terhadap Hamas. Akibatnya, *hudna* hanya berlangsung selama tiga bulan. Saat ini, *hudna* bisa dikembangkan menjadi solusi damai Israel-Palestina.

Meski demikian, proses *hudna* harus dilanjutkan dengan proses perundingan kedua pihak untuk menentukan keputusan final. Proses ini harus didasari oleh pengakuan eksistensi kedua pihak. Israel harus memberikan pengakuan pemerintahan Hamas

yang memenangi pemilu secara *fair*. Harus ada kesadaran bahwa Hamas adalah pilihan terbaik publik Palestina saat ini. Tindakan ini harus diimbangi dengan pengakuan pemerintahan Hamas terhadap negara Israel. Penghentian metode kekerasan yang selama ini dijalankan Hamas pun harus dilakukan. Di sisi yang berbeda, Israel juga harus menghentikan rencana militer sepihak yang mereka jalankan sejak tahun 2004 dan menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah yang disengketakan.

Prasyarat ini tidak akan bisa dijalankan tanpa kehadiran mediator yang kuat dalam proses perdamaian. Selama periode 1990-2000 peran mediator dijalankan oleh Amerika Serikat. Sejak George Walker Bush menjabat Presiden, secara teratur kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah mulai dialihkan dari *front* Palestina ke *front* Irak. Pergeseran fokus ini menciptakan lubang besar yang berusaha diisi secara bersama-sama oleh kelompok Kuartet. Hanya saja, peran kelompok Kuartet ini masih sangat minimal. Sejauh ini mereka hanya sanggup membawa kedua pihak menandatangani *Road Map*, yang sayangnya tidak pernah diimplementasikan. Pencarian mediator yang *fair* dan jujur ini menjadi pekerjaan rumah pertama proses perdamaian. Apalagi selama ini, isu Palestina-Israel cenderung dimanfaatkan oleh aktor-aktor di luar konflik untuk menunjukkan dominasinya. Harus pula dihindari pemanfaatan isu Palestina sebagai ajang unjuk hegemoni antara negara-negara besar. Jangan sampai keterlibatan mereka sebagai mediator didorong oleh alasan-alasan tersebut.

KESIMPULAN

Pasca-pemilu parlemen, Hamas tidak lagi bisa dilihat sebagai 'spoiler' bagi proses perdamaian. Karakter Hamas sebagai gerakan perlawanan (dan bukan kelompok teror), pragmatisme Hamas dan realitas politik Palestina tidak lagi memungkinkan strategi perdamaian yang tanpa Hamas untuk dilaksanakan. Penerimaan terhadap realitas kemenangan Hamas menjadi prasyarat bagi kelanjutan proses perdamaian. Di sisi yang berbeda, Hamas pun harus bersedia meninggalkan jalan kekerasan. Keputusan untuk menawarkan *hudna* sebagai salah satu solusi perdamaian menjadi langkah positif. Namun jangan sampai tawaran tersebut menempatkan *full withdrawal* sebagai prasyaratnya. *Hudna* harus diletakkan dalam konteks perundingan.

Sebagai pilihan rasional publik Palestina, Hamas harus menempatkan kebutuhan publik Palestina dalam prioritas utama. Tidak sepatutnya lagi Hamas berkutat dengan landasan ideologis saja. Salah satunya adalah dengan membentuk *national unity* dengan melibatkan Fatah dalam pengambilan kebijakan. Hal ini akan bisa dilaksanakan dengan terciptakan panduan besar bagi perjuangan kemerdekaan Palestina (salah satunya dengan menyelesaikan bangunan nasionalisme dan masalah kepemilikan senjata).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Firestone, Reuven. 1999. *Jihad: The Origin of Holy War in Islam*, New York dan Oxford.

Peters, Rudolph. 1996. *Jihad in Classical and Modern Islam*, London: Marcus Wiener Publisher.

World Bank. 2004. *Four Years – Intifadah, Closures and Palestinian Economic Crisis: An Assessment*.

World Bank. 2004. *West Bank and Gaza Update*.

Jurnal

Abu-Amr, Ziad. 1993. " Hamas: A Historical and Political Background", *Journal of Middle East Studies* 22(4); 5-19.

Ali, Raja Mustafa. 2000. " Hamas: Case Studies of an Armed Resistance Movement", *Strategic Studies* 20(2-3); 136-167.

Baumgarten, Helga. 2005. "The Three Faces/Phases of Palestinian Nationalism, 1948-2005", *Journal of Palestine Studies* 34(4); 25-48.

Gunning, Jeroen. 2004. "Peace with Hamas? The Transforming Potential of Political Participation", *International Affairs* 80(2); 233-255.

Hroub, Khaled. 2004. " Hamas After Shaykh Yasin and Rantisi", *Journal of Palestine Studies* 33(4); 21-38.

Litvak, Meir. 1998. "Islamization of the Palestinian-Israeli Conflict: The Case of Hamas" *Middle Eastern Studies* 34(1);148-163.

Maqdsi, Muhammad. 1993. "Charter of the Islamic Resistance Movement (Hamas) of

Palestine", *Journal of Palestine Studies* 22(4); 122-134.

Milton-Edwards, Beverley and Alastair Crooke. 2004. "Elusive Ingredient: Hamas and The Peace Process", *Journal of Palestine Studies* 33(4); 39-52.

Milton-Edwards, Beverley dan Alastair Crooke. 2004. 'Waving, Not Drowning: Strategic Dimensions of Ceasefires and Islamic Movement', *Security Dialogue* 35(3); 295-310.

Shikaki, Khalil. 2002. "Palestine Divide" *Foreign Affairs*.

Makalah

Mia, Akbar. 2002. *Pengaruh Strategi Hamas pada Proses Perdamaian Palestina-Israel September 1993-Juni 2002*, UI.

Internet

PSR Public Opinion Poll #17, <http://www.pcpssr.org/survey/polls/2005/p17a.html>.

Artikel Koran

Wardoyo, Broto. 14 Februari 2006. "Hudna dan Perdamaian Palestina-Israel", *Kompas*.

Wardoyo, Broto. 22 September 2005. "Palestina Merdeka?" *Kompas*.

CATATAN BELAKANG

1. Dalam pasal pertama Piagam Hamas dituliskan: "The Islamic Resistance Movement: Islam is its system. From Islam it reaches for its ideology, fundamental precepts, and world of life, the universe and humanity; and it judges all its action according to Islam and is inspired by Islam to correct its errors." Lihat dalam Muhammad Maqdsi, 1993. "The Charter of the Islamic Resistance

Movement (Hamas) of Palestine" *Journal of Palestine Studies* 22(4).

2. Pasal 8 Piagam Hamas menyatakan: "Allah is its Goal. The Messenger is its Leader. The Qur'an is its Constitution. Jihad is its methodology, and death for the sake of Allah is its most coveted desired." Sedangkan dalam pasal 15 dijelaskan bahwa: "In the struggle against Jewish occupation of Palestine, the banner of jihad must be raised." Lihat dalam *Ibid*.

3. Deklarasi Prinsip diidentikkan dengan solusi dua negara. Padahal di dalam Deklarasi Prinsip sendiri tidak secara tegas disebutkan keberadaan dua negara. Yang disebutkan adalah keberadaan dua entitas yang hidup berdampingan. Kelompok sayap kanan Israel menginterpretasikan Deklarasi ini sebagai usaha membentuk negara federasi dengan Wilayah Pendudukan sebagai wilayah otonomi. Mengenai Deklarasi Prinsip lihat dalam [Hhttp://www.mfa.gov.il/H_MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/Declaration+of+Principles.htm](http://www.mfa.gov.il/H_MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/Declaration+of+Principles.htm).

4. Lihat dalam "Hamas Harus Melucuti Senjata dan Mengakui Israel" *Kompas* edisi 30 Januari 2006

5. Lihat dalam "Abbas denies threatening Hamas but says it must moderate" *Haaretz online* edisi 27 Maret 2006 dalam [Hhttp://www.haaretzdaily.com/hasen/pages_H/ShArtVty.jhtml?sw=Hamas+Abbas+Negotiation&itemNo=698763](http://www.haaretzdaily.com/hasen/pages_H/ShArtVty.jhtml?sw=Hamas+Abbas+Negotiation&itemNo=698763).

6. Beberapa literatur menyatakan bahwa strategi perdamaian tanpa Hamas merupakan sebuah kesalahan. Jeroen Gunning berargumen bahwa Hamas bukanlah *spoiler* dalam proses perdamaian. Tindakan-tindakan Hamas merupakan bentuk dari kesetiaan ideologis mereka dan strategi untuk masuk politik domestik Palestina yang dikuasai Fatah. Dalam kerangka ini, Hamas tidak dapat dengan sederhana dimasukkan ke dalam kelompok anti-perdamaian. Lihat dalam Jeroen Gunning, 2004. "Peace with Hamas? The transforming potential of political participation" *International Affairs* 80(2); hlm. 233-255. Sementara itu, Khaled Hroub menggunakan istilah *dilemma of being second* untuk menjelaskan posisi Hamas terhadap proses perdamaian. Aksi-aksi Hamas dilihat oleh Hroub sebagai bentuk penentangan akan kondisi *status quo* yang ada internal Palestina. Lihat dalam Khaled Hroub, 2004. "Hamas after Syaikh Yassin and Rantisi" *Journal of Palestine Studies* 33(4); hlm. 21-38.

7. Untuk latar belakang tentang Hamas lihat dalam Ziad Abu-Amr, 1993. "Hamas: A historical and

political background" *Journal of Palestine Studies* 22(4); hlm. 5-19.

8. Meski tokoh-tokoh utama Hamas juga merupakan tokoh-tokoh Persaudaraan Muslim Palestina namun keduanya tidak memiliki keterkaitan organisasional. Hal ini dilakukan agar Persaudaraan Muslim tetap bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan-pendidikan yang telah mereka lakukan sebelumnya tanpa tekanan dari Israel. Hamas sendiri muncul sebagai kekuatan militer dan politik yang menentang pendudukan Israel atas wilayah Palestina.

9. Lihat dalam Raja Mustafa Ali, 2000, "Hamas: Case Studies of an Armed Resistance Movement," *Strategic Studies* 20(2-3); 137-148.

10. Lebih detail mengenai pergeseran tuntutan wilayah ini lihat dalam Jeroen Gunning, 2004, *Loc. Cit.* atau dalam Khaled Hroub, *Loc. Cit.*

11. Lihat dalam Broto Wardoyo, "Hudna dan Perdamaian Palestina-Israel", *Kompas* edisi 14 Februari 2006

12. Lihat dalam "Four Years - Intifadah, Closures and Palestinian Economic Crisis: An Assessment," World Bank, Oktober 2004, hlm.xiv.

13. Hasil riset PCPSR September 2005 menunjukkan bahwa 84% responden menilai penarikan mundur Israel dari Gaza sebagai kemenangan perjuangan bersenjata dan 40% memberikan pujian terhadap Hamas dalam usaha perjuangan bersenjata tersebut. Lihat dalam PSR Public Opinion Poll #17, <http://www.pcpsr.org/survey/polls/2005/p17a.html>.

14. Lihat dalam Broto Wardoyo, "Palestina Merdeka?" *Kompas* edisi 22 September 2005.

15. Lihat dalam World Bank, West Bank and Gaza Update, November 2004, hlm.11 dan 23.

16. Selengkapnya lihat dalam Beverley Milton-Edwards dan Alastair Crooke, "Waving, Not Drowning: Strategic Dimensions of Ceasefires and Islamic Movement," *Security Dialogue* 35(3); hlm.295-310.